

Kebijakan Luar Negeri Ekonomi Indonesia Terhadap Thailand dalam Cross-Border Payment

Rizka Maharani
Universitas Indonesia

Abstrak

Digitalisasi pembayaran pada era globalisasi mengarahkan pada integrasi keuangan dengan mekanisme cross-border payment yang diterapkan oleh ASEAN. Penerapan mekanisme ini masih dilakukan secara bilateral antarnegara anggota ASEAN yang salah satunya dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh masing-masing bank sentral sejak tahun 2022 ditujukan agar mengurangi ketergantungan dengan dolar AS yang menunjukkan hasil yang positif dan progresif dalam mekanisme ini. Hal ini menarik untuk diteliti karena transaksi rupiah terhadap ringgit lebih besar dibandingkan baht, tetapi Indonesia melakukan implementasi cross-border payment dengan penggunaan QR Code pertama kali dengan Thailand. Selain itu, terdapat implementasi konversi nilai tukar antara Indonesia dan Thailand yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan Bank of Thailand selaku bank sentral masing-masing negara. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan luar negeri ekonomi Indonesia terhadap Thailand dalam cross-border payment, khususnya pada penggunaan QR Code melalui QRIS dan Promptpay. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penggunaan data kualitatif dan kuantitatif. Dengan menggunakan konsep Kebijakan Ekonomi Luar Negeri yang merujuk pada Hiscox (2014), artikel ini menemukan bahwa Indonesia melakukan kerja sama dengan Thailand dalam penggunaan QR Code karena adanya kesepakatan nilai tukar antara IDR dan THB untuk menjaga stabilitas nilai tukar masing-masing mata uang, pergerakan masyarakat untuk berwisata yang menunjukkan peningkatan transaksi QR Code, mencapai keuntungan bersama dan memulihkan sektor pariwisata dan UMKM, serta keterlibatan sektor swasta dan bank sentral independen dalam pengimplementasian hal ini.

Kata Kunci: cross-border payment, Indonesia, QR Code, Thailand.

Abstract

The digitalisation of the payment in the era of globalisation leads to financial integration with the cross-border payment implemented by ASEAN. The implementation of this mechanism is still being implemented bilaterally among ASEAN member states, for instance between Indonesia, Malaysia and Thailand. The Memorandum of Understanding (MoU) signed by each central bank since 2022 aims to reduce the US dollar dependency which shows positive and progressive results in this mechanism. This issue is interesting to be studied further as the transaction of rupiah to ringgit is higher compared to baht, but Indonesia conducted the implementation of cross-border payment using QR Code for the first time with Thailand. Furthermore, there is a conversion of the currency rate between Indonesia and Thailand which is determined by the Bank Indonesia and Bank of Thailand as the central banks from each country. This article uses qualitative research methods with qualitative and quantitative data usage. Using the foreign economic policy which refers to Hiscox (2014), this article found that Indonesia has been cooperating with Thailand in using QR Code due to the exchange rate agreement between IDR and THB to maintain the stability of the exchange rates of each currency, people movement to travel that showed an increment in QR Code transactions, to perceive the mutual gains and recovery for the tourism and SMEs sectors, and private sector and independent central bank involvement within this implementation.

Keywords: cross-border payment, Indonesia, QR Code, Thailand.

Latar Belakang

Adanya arus globalisasi memudahkan perpindahan barang, jasa, dan manusia karena mengaburnya lintas batas antarnegara. Terlepas dari ketiga hal tersebut, kemajuan teknologi juga mengarah pada kemudahan transaksi baik dalam level negara, pasar, ataupun *people-to-people*. Upaya suatu negara dalam mencapai hal ini salah satunya dapat dilihat dari upaya Indonesia yang membawa agenda mengenai *local currency settlement* pada G20 maupun ASEAN. *Local currency settlement* merupakan transaksi bilateral yang dilakukan dengan mata uang lokal yang transaksinya didasari atas yurisdiksi dari negara masing-masing (Bank Indonesia n.d.) dan penerapan QR Code sebagai salah satu mode pembayaran juga termasuk dalam kerangka *local currency settlement*. Indonesia membawa agenda ini dalam rangka mendorong perekonomian melalui ekonomi digital dengan pelaksanaan yang lebih baik, inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminasi (Rifky, Nugrahaningsih, & Suratiningsih 2023), serta percepatan digitalisasi menuju inklusi ekonomi-keuangan, *remittance*, perdagangan ritel, dan UMKM (Bank Indonesia 2022). Untuk mewujudkan hal ini, Indonesia melalui Bank Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara mitra di ASEAN, salah satunya adalah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selain itu, pada Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022, G20 bersama Financial Supervisory Board (FSB) sepakat untuk mencapai inisiasi *cross-border payment* hingga 2027 (Bank Indonesia 2022).

Setelah adanya upaya yang dilakukan Indonesia dalam Presidensi G20 di tahun 2022, Indonesia berupaya untuk mengimplementasikan digitalisasi pembayaran yang didasari untuk mencapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN) (Rilo 2018). Sebelum Indonesia bekerja sama dengan negara mitra di ASEAN, Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Malaysia dan Thailand pada 25 Agustus 2023. Penandatanganan MoU tersebut berawal dari kerja sama subregional yang telah dilakukan oleh ketiga negara, yaitu melalui IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) sejak tahun 1993 (Supadi 2021) dan diwakili oleh masing-masing bank sentral setelah adanya uji coba dalam kerangka *cross-border payment* antara Indonesia dan Thailand di tahun 2021, serta Indonesia dan Malaysia di tahun 2022 dalam penggunaan QR Code (Bank of Thailand 2023) (Medina 2022). Di sisi yang lain, ketiga negara tersebut sebelumnya juga sudah menandatangani MoU dalam penerapan *local currency settlement* di tahun 2017 mendorong penggunaan mata uang lokal dalam melakukan transaksi, terutama pada sektor perdagangan dan investasi. Kerja sama yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini didasari atas upaya untuk mengurangi ketergantungan dengan dolar AS (USD) dalam bertransaksi, adanya kesamaan latar belakang sejarah, yaitu krisis

ekonomi akibat fluktuasi nilai tukar mata uang, serta memperkuat nilai tukar rupiah (IDR), ringgit (MYR), dan baht (THB) (Syifa 2024).

Meskipun telah diberlakukannya *local currency settlement* antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, transaksi ekspor dan impor masih didominasi dalam penggunaan dolar AS di tahun 2018 (Supadi 2021). Transaksi *local currency settlement* atas ringgit juga lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi atas baht yang dapat dilihat sejak tahun 2018 hingga awal 2023. Di tahun 2018, transaksi *local currency settlement* atas ringgit di tahun 2018 berjumlah US\$22,5 juta dan meningkat hingga US\$49,6 juta di tahun 2019. Selain itu, di tahun 2021, perdagangan antara Indonesia dan Malaysia dalam kerangka ini juga menunjukkan kenaikan pada angka USD\$19,5 miliar, US\$27,9 miliar di tahun 2022, dan mencapai US\$7,9 miliar di kuartal pertama tahun 2023 (Shofa 2023). Di sisi yang lain, transaksi *local currency settlement* antara rupiah dan baht cenderung lebih rendah dibandingkan dengan ringgit. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2018 yang transaksinya berjumlah US\$9,2 juta per bulan dan menunjukkan peningkatan di tahun 2019 menjadi US\$13,7 juta per bulan. Lalu, transaksi dalam kerangka *local currency settlement* juga menunjukkan peningkatan di tahun 2021 di angka US\$16,2 miliar dan terus meningkat menjadi US\$19,2 miliar di tahun 2022 (Nofansya & Sidik 2022).

Pada awalnya, kerangka *local currency settlement* difokuskan pada sektor perdagangan dan investasi, tetapi saat ini akan mencakup sektor pariwisata dan UMKM untuk memperluas cakupan penggunaan *local currency settlement* dalam *cross-border payment* (Sutrisno 2022). Lebih lanjut, upaya digitalisasi pembayaran yang dicanangkan oleh Indonesia dengan negara mitra juga diimplementasikan dengan penggunaan QR Code. Hal ini ditujukan untuk mencapai *fast payment* yang dilakukan secara bilateral dan nantinya akan diupayakan mencakup multilateral (Bank Indonesia 2022). Penggunaan QR Code oleh Bank Indonesia merupakan salah satu wujud implementasi *blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 yang saat ini sudah dilaksanakan dengan beberapa negara, salah satunya adalah Thailand. Bank of Thailand menyatakan bahwa integrasi QR Code antara Indonesia dan Thailand dapat mewujudkan *cross-border payment* yang efisien dan inklusif sehingga QRIS dan Thai QR Code, atau dikenal dengan Promptpay, dapat diterapkan (IDN Financial 2022).

Dengan adanya kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam penggunaan QR Code, Bank Indonesia dan Bank of Thailand menunjuk *appointed cross currency dealer* (ACCD) di negara masing-masing untuk menerapkan *direct quotation* dalam mengonversi nilai tukar masing-masing dalam bertransaksi. ACCD terdiri atas bank atau non-bank sebagai pihak yang menyediakan jasa konversi mata uang antara rupiah dan

baht secara langsung tanpa menggunakan konversi valuta asing ke dolar AS (Bank Indonesia 2021). Ketentuan nilai tukar antara rupiah dan baht menggunakan ketentuan *floating exchange rate* sebagai upaya pengurangan penggunaan dolar AS secara bilateral antara Indonesia dan Thailand (Sari et al 2023). Dalam hal ini, *floating exchange rate* adalah penerapan nilai tukar mata uang secara fluktuatif sebagai respons terhadap permintaan dan pasokan pasar (Hiscox 2014).

Untuk menegaskan kebaruan penelitian dari topik yang ditulis, jurnal ini membuat dua kategorisasi berdasarkan literatur terdahulu, yaitu 1) kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam sektor keuangan, dan 2) penerapan *local currency settlement* Indonesia dengan negara mitra. Literatur terdahulu yang dirujuk adalah sebagai berikut Azka (2023), Nofansya dan Sidik (2022), Rizki (2022), Sulfarid (2022) dan Siahaan (2020) secara umum membahas mengenai upaya kerja sama antara Indonesia dengan negara mitra, seperti Malaysia, Thailand, Cina, dan Korea Selatan sesuai dengan kepentingannya masing-masing dalam kerangka *local currency settlement* sebagai upaya meningkatkan perekonomian di masing-masing negara. Namun, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai implementasi kebijakan luar negeri ekonomi Indonesia terhadap Thailand dalam penggunaan QR Code pada *cross border payment*. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, uji coba pengimplementasian QR Code sebagai bentuk *cross-border payment* dalam *local currency settlement* antara Indonesia dan Thailand telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Thailand merupakan negara pertama yang bekerja sama dengan Indonesia dalam pengintegrasian QR Code karena adanya anggapan bahwa pengimplementasian QR Code lebih murah dan efektif dibandingkan dengan sistem mode pembayaran lainnya (Azka 2023). Namun, apabila melihat data mengenai transaksi *local currency settlement* dengan negara mitra, transaksi atas ringgit lebih tinggi dibandingkan transaksi atas baht. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah “bagaimana implementasi kebijakan luar negeri ekonomi Indonesia terhadap Thailand dalam penggunaan QR Code pada *cross-border payment*?”

Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang merujuk pada Neuman (2014) dengan jenis penelitian eksplanatif untuk mengelaborasi dan memperkaya penjelasan dari teori atau konsep yang digunakan dengan topik atau isu yang diangkat. Selain itu, penulisan penelitian ini juga akan menggunakan teknik penelitian kualitatif deduktif dengan penggunaan konsep dalam ilmu Hubungan Internasional dalam menganalisis fenomena yang ditulis dalam penelitian ini dengan bukti empiris sebagai penguat analisis (Neuman 2014). Untuk menunjang penelitian ini, penggunaan data kualitatif yang terdiri atas kata, gambar,

atau objek dari sumber sekunder, seperti dokumen, data, *website* resmi, buku, jurnal, dan data penunjang lainnya sebagai penguat penulisan penelitian ini yang akan dikumpulkan melalui teknik penelitian kualitatif (Neuman 2014). Namun, penulis juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan data kuantitatif, seperti data statistik yang nantinya dapat menunjukkan fenomena yang terjadi dalam topik yang diangkat pada penulisan penelitian ini.

Landasan Konseptual

Dalam penulisan jurnal ini, konsep yang digunakan adalah Kebijakan Luar Negeri Ekonomi yang merujuk pada Hiscox (2014) dalam subbab "*The Domestic Sources of Foreign Economic Policies.*" Ia berpendapat bahwa setiap pemerintahan dalam suatu negara perlu membuat pilihan terbaik dalam mengelola perekonomiannya. Untuk memahami suatu kebijakan ekonomi luar negeri dibuat, terdapat dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, mengidentifikasi preferensi kebijakan dari setiap kelompok dalam ekonomi domestik. Dalam hal ini, setiap preferensi kebijakan membutuhkan analisis ekonomi karena menentukan jenis aset yang dimiliki oleh suatu negara dan bagaimana pendapatan yang diperoleh dari aset tersebut dipengaruhi oleh berbagai pilihan kebijakan. *Kedua*, membuat spesifikasi institusi politik menentukan preferensi kebijakan digabung atau diubah menjadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di sisi yang lain, hal ini membutuhkan analisis politik, seperti melihat bagaimana suatu kelompok melobi pemerintah dan bagaimana suatu kebijakan diusulkan di badan legislatif, serta dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang bergantung pada struktur lembaga politik masing-masing negara. Kedua hal ini umum disebut sebagai pendekatan ekonomi politik yang menggabungkan analisis ekonomi dan politik secara bersamaan dalam mempelajari hasil kebijakan (Hiscox 2014).

Dalam preferensi kebijakan, terdapat empat hal di dalamnya yang menjadi sorotan. *Pertama*, yaitu perdagangan. Dalam ekonomi internasional, yang menjadi bukti dari suatu interaksi adalah *mutual gains* yang dapat dilihat dari model perdagangan Heckscher-Ohlin, yaitu keunggulan komparatif didasari dari faktor produksi yang berbeda, seperti tanah, tenaga kerja, dan modal yang digunakan dalam proporsi berbeda. Pekerja dan pemilik industri di bidang yang sama biasanya bekerja sama untuk melobi dalam pemberian perlindungan terhadap hambatan impor. *Kedua*, yaitu imigrasi. Dengan adanya globalisasi yang mengaburkan batas negara, baik barang, jasa, maupun manusia dapat melintasi batas wilayah suatu negara. Hal ini menunjukkan adanya imigrasi pekerja dan investasi internasional, serta pinjaman yang mentransfer modal melintasi batas negara. Menurut Hiscox (2014), imigrasi dianggap sebagai pembicaraan politik dibandingkan perdagangan atau investasi. Arus migrasi memiliki tujuan ekonomi yang sama dengan arus perdagangan yang dianggap sebagai fungsi dari

perbedaan negara dalam hal ketersediaan tenaga kerja dan faktor lainnya sehingga pergerakan barang dan faktor internasional merupakan substitusi satu sama lain (Hiscox 2014).

Ketiga, investasi asing. Hal ini membentuk transaksi keuangan antarwarga negara dari berbagai negara yang mengalihkan hak kepemilikan atas aset, seperti bank di suatu negara meminjamkan uang pada perusahaan asing. Semua transaksi yang dilakukan meningkatkan ketersediaan modal yang tersedia untuk penggunaan produktif di suatu negara, dan menurunkan persediaan modal di negara lain. Terdapat dua bentuk investasi asing, yaitu 1) pergerakan modal jangka pendek, termasuk obligasi pemerintah, berubah dengan cepat sebagai respons terhadap perubahan kondisi makroekonomi, dan 2) aliran modal jangka panjang atau *foreign direct investment* (FDI) yang biasanya dilakukan oleh MNC dan berdampak pada perekonomian di *host country* yang mengelola afliasinya. *Keempat*, nilai tukar. Dalam melakukan transaksi lintas batas negara, hal utama yang harus diperhatikan adalah mengonversi mata uang nasional suatu negara ke mata uang nasional negara lain. Pilihan mendasar yang dapat diambil oleh pemerintah menurut Hiscox (2014) adalah 1) membiarkan nilai mata uang nasional berfluktuasi secara bebas sebagai respons terhadap permintaan dan pasokan pasar (*pure float*), atau 2) menetapkan nilai mata uang berdasarkan mata uang lain atau standar eksternal (*fixed*). Dengan kata lain, ketika pemerintah menetapkan nilai tukar resmi dan berkomitmen untuk membeli mata uang pada nilai tukar tersebut bila diminta oleh pihak swasta atau pemerintah asing.

Di antara kedua pilihan ini, pemerintah dapat memilih nilai target untuk nilai tukar dan hanya membiarkan mata uang berfluktuasi nilainya dalam rentang tertentu di sekitar nilai tukar target. Dengan menghilangkan fluktuasi nilai tukar, penetapan harga membuat perdagangan dan investasi internasional menjadi lebih murah bagi perusahaan atau individu karena tidak terdampak buruk oleh perubahan nilai tukar yang berubah secara tiba-tiba dan tidak terduga. Inti dari *fixed* dan *floating exchange rate* adalah pilihan antara stabilitas dan pengendalian kebijakan. Pemerintah di negara maju umumnya memutuskan bahwa pengendalian kebijakan lebih penting dibandingkan stabilitas nilai tukar. Di sisi yang lain, pemerintah di negara berkembang memilih stabilitas nilai tukar sebagai hal yang lebih penting dibandingkan pengendalian kebijakan karena negara tersebut cenderung bergantung pada perdagangan dan investasi asing sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (Hiscox 2014). Dalam artikel ini, meskipun Hiscox (2014) mengatakan terdapat empat preferensi kebijakan, tetapi artikel ini hanya akan berfokus pada nilai tukar sebagai preferensi kebijakan utama. Hal ini disebabkan karena dalam isu yang akan ditulis, perdagangan, imigrasi, dan investasi asing bukan menjadi preferensi utama dalam penggunaan QR Code yang diterapkan antara

Indonesia dan Thailand. Namun, setelah adanya persetujuan mengenai nilai tukar, ketiga hal tersebut menjadi hal yang mendukung terjadinya transaksi QR Code sebagai bentuk *cross-border payment*.

Selanjutnya, setelah adanya preferensi kebijakan oleh pemerintah, terdapat institusi politik untuk diubah sebagai pembentukan kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara. Hiscox (2014) menyatakan setidaknya terdapat proses legislatif dan badan administratif yang mengimplikasikan formulasi dan implementasi dari preferensi kebijakan tersebut. Namun, artikel ini hanya akan berfokus pada badan administratif dan birokrasi yang mengimplementasikan hal tersebut. Peraturan yang dibuat oleh badan administratif ini memiliki dampak besar terhadap cara preferensi individu dan kelompok yang digabungkan dalam kebijakan ekonomi luar negeri. Aturan yang dibuat menentukan cara kebijakan baru diusulkan, dipertimbangkan, diubah, dan dipilih. Selain itu, terdapat juga bank sentral independen yang memiliki kendali penuh atas kebijakan moneter yang terlepas dari kepentingan politik para pelaku pasar. Pemerintah dapat menghindari atau mengatasi inflasi yang ditakutkan oleh pihak swasta nasional atau asing yang memiliki peran dalam perekonomian domestik. Bank sentral independen juga memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan mata uang dalam melakukan interaksi dengan negara lain (Hiscox 2014).

Artikel ini menggunakan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri yang merujuk pada Hiscox (2014) karena menganggap adanya kesesuaian dan keselarasan dalam memaparkan dan menjelaskan isu penggunaan QR Code antara Indonesia dan Thailand. Selain itu, Hiscox (2014) juga menjelaskan mengenai pentingnya peran bank sentral independen dalam menentukan kebijakan mata uang yang selanjutnya dapat membantu artikel ini menjelaskan lebih lanjut peran Bank Indonesia maupun Bank of Thailand dalam mengimplementasikan *cross-border payment* dengan penggunaan QR Code.

Hasil dan Diskusi

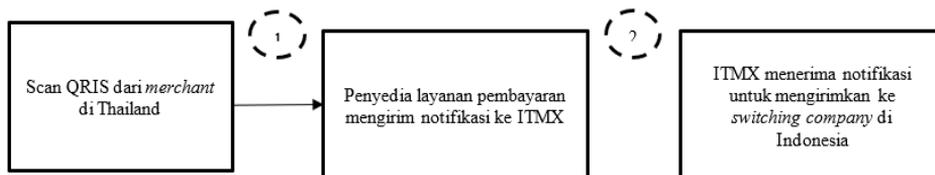
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya *cross-border payment* pada kerangka *local currency settlement* adalah untuk mengurangi ketergantungan dengan dolar AS. Dalam hal ini, Bank Indonesia maupun Bank of Thailand berupaya untuk menyelaraskan regulasi dan spesifikasi pembayaran, termasuk bagaimana konversi mata uang masing-masing negara dalam melakukan transaksi, khususnya dalam menggunakan QR Code.

Nilai Tukar sebagai Preferensi Kebijakan Luar Negeri Ekonomi Indonesia terhadap Thailand dalam Cross-Border Payment

Pengimplementasian QRIS dan Promptpay didasari atas kerangka *local currency settlement* melalui penandatanganan MoU antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada 11 Desember 2017. *Local currency settlement* ditujukan atas dasar krisis ekonomi yang pernah melanda Asia di akhir tahun 1990-an akibat ketergantungan dengan dolar AS sehingga nilai tukar mata uang ketiga negara melemah sehingga upaya yang dilakukan adalah mengadopsi kebijakan nilai tukar yang lebih fleksibel (Sato 2019). Meskipun penandatanganan MoU ditandatangani oleh ketiga negara, tetapi pelaksanaannya masih dilaksanakan secara bilateral antarnegara pada Kerangka Kerja Sama untuk Mempromosikan Transaksi Bilateral dalam Mata Uang Lokal Antarnegara (Bank of Thailand 2023). Di awal pelaksanaan *local currency settlement* ini, masih berfokus pada sektor perdagangan dan investasi sehingga aktor yang terlibat dititikberatkan pada pelaku pasar. Namun, pada penggunaan QR Code dalam *cross-border payment* yang dilakukan pada uji coba di tahun 2021, juga menyasari konsumen dan *merchant* di masing-masing negara agar dapat bertransaksi secara langsung. Transaksi tersebut dilakukan dengan penerapan *direct quotation* konversi mata uang masing-masing negara dengan penunjukan ACCD dari masing-masing bank sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan Bank of Thailand, dengan tujuan untuk menurunkan biaya transaksi yang semula harus mengonversi ke dolar AS sebelum menukar dari rupiah ke baht dan sebaliknya (Bank Indonesia 2021).

Dalam mengimplementasikan transaksi QR Code antarkedua negara, penerapan nilai tukar dilakukan dengan menggunakan *floating exchange rate*¹ sebagai bentuk fleksibilitas dari transaksi rupiah dan/atau baht, serta ditujukan sebagai bentuk tidak bergantung sepenuhnya pada dolar AS. Sebelumnya, nilai tukar yang ditetapkan pada konversi terhadap dolar AS adalah menggunakan *fixed exchange rate* (Sari et. all 2023). Peluncuran secara penuh dari pengimplementasian QRIS dan Promptpay dilaksanakan pada tahun 2022 (Bank of Thailand 2022). Berikut adalah ilustrasi konversi dari rupiah ke baht, atau sebaliknya berdasarkan kerangka *local currency settlement*.

Tabel 1. Ilustrasi konversi masing-masing mata uang antara rupiah dan baht berdasarkan kerangka *local currency settlement* (LCS)



Sumber: Bank Negara Malaysia n.d.

Keterangan:

¹Konversi langsung dari THB ke IDR

²Transfer IDR dari ITMX ke *switching company* di Indonesia

³*Switching company* Indonesia akan menerima IDR dan akan meneruskan ke jasa penyedia layanan pembayaran di Indonesia (ACCD)

*Tahapan konversi antara IDR ke THB juga dilakukan dengan skema yang sama

**Tahapan dari transaksi QR Code antara Indonesia dan Thailand akan dibahas di subbab selanjutnya

Transaksi yang terjadi antara Indonesia dan Thailand dilakukan dengan beberapa tahapan seperti bagan di atas. Dari sisi Thailand, konsumen dapat melakukan *scanning* terhadap QRIS pada *merchant* Indonesia, lalu penyedia layanan pembayaran mengirimkan notifikasi ke ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange)¹ untuk menerima notifikasi dan mengurangi saldo konsumen. Tahap selanjutnya adalah ITMX akan mentransmisikan ke *switching company* yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai pihak penyedia dari *merchant* tersebut dan *switching company* akan meneruskan pembayaran ke penyedia layanan pembayaran (ACCD) di Indonesia. Tahapan yang sama dilakukan pula apabila konsumen Indonesia akan melakukan *scanning* Promptpay secara *reverse transaction flow* (Bank of Thailand n.d.).

Cross-border payment mencakup beberapa aspek, seperti teknis, bisnis, dan hukum, serta keterlibatan beberapa pihak yang ditunjuk oleh bank sentral dalam pengimplementasian QR Code antara Indonesia dan Thailand, seperti Asosiasi Pembayaran Indonesia (ASPI)² dari Indonesia, ITMX dari Thailand bertindak sebagai *switching company*, ATM Bersama (Artajasa Pembayaran Electronic), ATM prima (Rintis Sejahtera), ATM Link (Sigma Cipta Caraka), dan ATM Alto (Daya Network Lestari) sebagai

switching company di Indonesia (Kominfo n.d.), dan ACCD, termasuk penyedia layanan pembayaran (Bank of Thailand n.d.) (The Jakarta Post 2018).

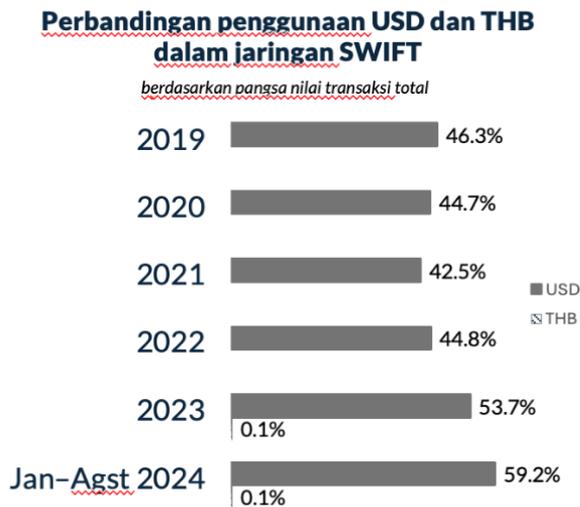
Pada *Roadmap G20* mengenai peningkatan kecepatan, biaya, dan transparansi dan aksesibilitas terhadap transfer lintas batas, telah disepakati bahwa negara perlu menerapkan dan mengimplementasikan ISO 20022 melalui High-Value Payment Systems untuk menerapkan pembayaran yang cepat, termasuk di seluruh jaringan SWIFT untuk pembayaran dan pelaporan lintas negara. Pengadopsian ISO 20022 telah diberlakukan sejak Maret 2023 hingga November 2025 yang memungkinkan terstruktur (Swift 2024). SWIFT sebagai salah satu sistem pembayaran global tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan pembayaran bagi para pelaku pasar, tetapi juga konsumen (*people-to-people*) dan UMKM (Swift 2024). SWIFT tidak memindahkan dana, tetapi memfasilitasi aliran informasi keuangan lintas batas yang mendukung para pengguna SWIFT, seperti institusi perbankan, perusahaan, *investment firms*, infrastruktur pasar, dan tidak menutup kemungkinan individu yang menggunakan jaringan SWIFT. Jaringan SWIFT menyediakan komunikasi antara satu bank dengan bank yang lain secara efisien dan biaya yang rendah (Jin 2022) sehingga SWIFT bertindak sebagai penghubung antara satu bank dengan bank lain dan bank-bank tersebut yang bertransaksi. Biaya transaksi yang diterapkan bergantung dari tipe transfer, negara tujuan, biaya valuta asing, dan biaya pelacakan. Setidaknya terdapat tiga tipe transfer dalam SWIFT, yaitu 1) BEN, penerima menanggung semua biaya dari transaksi diterima dalam waktu singkat, 2) OUR, pengirim menanggung semua biaya yang biasanya ditagihkan secara terpisah dan transaksi diterima secara penuh, dan 3) SHA, setiap pihak dikenakan biaya oleh masing-masing bank dengan pengirim dikenakan biaya secara terpisah dari bank pengirim dan penerima membayar ke bank penerima dari transaksi yang dilakukan (Schonken 2023).

Di sisi yang lain, penerapan *cross-border payment* dalam *local currency settlement* digunakan untuk menggunakan mata uang lokal masing-masing negara yang telah bekerja sama dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Namun, saat ini belum ada pasar valuta asing yang kuat untuk mata uang di Asia Tenggara dan hal ini menunjukkan terhadap selisih antara nilai beli dan jual untuk pasangan mata uang lokal di Asia Tenggara dapat lebih dari dua kali lipat daripada selisih nilai jual beli untuk mata uang lokal terhadap dolar AS (Greene 2022). Oleh karena itu, dalam konteks kerja sama *cross-border payment* antara Indonesia dan Thailand dalam penggunaan QR Code, sistem *floating exchange rate* diterapkan dan nilai tukar antara rupiah dan baht disesuaikan berdasarkan kurs dari penyelenggara yang digunakan oleh konsumen dalam menyimpan sumber dananya. Berbeda dengan SWIFT, *cross-border payment* merupakan

mekanisme yang dibentuk antarnegara, biasanya melalui bank atau non-bank yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan (Schonken 2023). Posisi *cross-border payment* dapat dikatakan sebagai komplementer dari SWIFT sebagai alternatif jasa transfer yang dilakukan karena bentuknya bukan menggantikan karena penggunaan dolar AS masih diberlakukan.

Dalam jaringan SWIFT, penggunaan dolar AS masih mendominasi sejak Januari 2019 hingga Agustus 2024. Dibandingkan dengan rupiah dan ringgit, baht menempati posisi 15 dari 24 negara yang menggunakan SWIFT dilihat dari pangsa nilai total (Statista 2024). Berikut adalah tabel perbandingan penggunaan dolar AS dan baht pada jaringan SWIFT.

Gambar 1. Perbandingan Penggunaan USD dan THB dalam Jaringan SWIFT



Sumber : Statista 2024

Di sisi yang lain, apabila dibandingkan dengan penggunaan pembayaran digital antara Indonesia dan Thailand, berikut adalah perbandingan dari tahun 2021 hingga proyeksi yang akan dicapai di tahun 2024. Nilai transaksi total Indonesia dalam pasar pembayaran digital yang mencakup *mobile payment* melalui *smartphone* dan transfer uang lintas batas melalui internet (*digital remittance*) diproyeksikan mencapai US\$102,30 triliun di tahun 2024. Hal ini terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024 secara berturut-turut, yaitu dengan nilai US\$71,71 triliun, US\$77,54 triliun, US\$88,43 triliun, dan US\$102,30 triliun (Statista n.d.). Di sisi yang lain, nilai transaksi total Thailand pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai US\$39,28 triliun dengan penggunaan Promptpay sebesar 32,742 triliun THB pada tahun 2021, 43,206 triliun THB pada tahun 2022, dan 47,419 triliun THB di tahun 2023 (Statista n.d.).

Dalam penggunaan QR Code pada QRIS dan Promptpay, tidak terdapat biaya transaksi yang dibebankan pada konsumen dalam mengirimkan uangnya. Namun, pada *local currency settlement*, terdapat beberapa biaya yang disesuaikan dari masing-masing bank ACCD, seperti 1) biaya *telegraphic transfer*, yaitu layanan yang memungkinkan untuk mengirim uang ke rekening di luar negeri pada rentang Rp35.000 hingga Rp75.000 (Bank Mandiri n.d.) (BCA n.d.), dan 2) biaya provisi, yaitu biaya yang dikenakan apabila mata uang sumber dana sama dengan mata uang valas yang dikirim (Bank Mandiri n.d.). Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, baik Bank Indonesia maupun Bank of Thailand menerapkan *floating exchange rate* sehingga memberikan keleluasaan bagi ACCD dalam menentukan nilai tukar dalam transaksi yang dilakukan pada sistem mereka.

Berdasarkan data dari Bank of Thailand per 4 April 2024, pada tabel 2 adalah mekanisme *cross-border payment* yang diterapkan antara Indonesia dan Thailand dalam penggunaan QR Code. Merujuk pada data Bank Indonesia di media sosialnya, perkembangan transaksi QRIS per Februari 2024 secara *inbound* berjumlah 368,65 juta rupiah, sedangkan data *outbound* berjumlah 10,19 miliar rupiah (Bank Indonesia, 2024). Data tambahan juga menunjukkan bahwa transaksi QRIS di Indonesia per Juli 2024, peningkatan transaksi QRIS di Indonesia berjumlah 13% *month-to-month* dari masyarakat Thailand, sedangkan peningkatan QRIS di Thailand berjumlah 9% *month-month* (Bank Indonesia 2024). Penerapan QR Code antara Indonesia dan Thailand ditujukan agar dapat memajukan UMKM sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan perekonomian dan ekosistem keuangan digital yang terhubung dengan Promptpay. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia memilih untuk bekerja sama dengan Thailand dalam pengimplementasian QR Code pertama kali secara lintas batas. Selain itu, pada tahun 2018 hingga 2023, produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara berturut-turut adalah US\$1.043 triliun, US\$1.119 triliun, US\$1.063 triliun, US\$1.188 triliun, US\$1.319 triliun, dan US\$1.417 triliun, sedangkan PDB Thailand secara berturut-turut adalah US\$507 triliun, US\$544 triliun, US\$500 triliun, US\$506 triliun, US\$495 triliun, dan US\$512 triliun. Indonesia menempati peringkat pertama pada pendapatan PDB, diikuti Thailand di urutan kedua (Statista n.d.) yang sumber utama pendapatan PD-nya berasal dari pariwisata (Statista n.d.).

Tabel 2. Cross-border payment Indonesia dan Thailand

Pegguna dari Indonesia yang melakukan transaksi di Thailand		Limit transaksi	Pegguna dari Thailand yang melakukan transaksi di Indonesia		Limit transaksi
Bank dari Indonesia yang berpartisipasi	Pembayaran QR yang memenuhi syarat di <i>merchant</i> Thailand		Bank dari Thailand yang berpartisipasi	Pembayaran QR yang memenuhi syarat di <i>merchant</i> Indonesia	
ACCD	Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Krungthai Bank, SCB, Bank of Ayudhya, CIMB Thai	IDR 5.000.000 per transaksi	Bangkok Bank, Krungthai Bank, Bank of Ayudhya, CIMB Thai	QRIS	100.000 THB per transaksi 500.000 THB per hari

Sumber : diolah oleh Penulis dari data Bank of Thailand

Bank Indonesia sebagai Badan Administratif dan Birokrasi untuk menentukan Nilai Tukar sebagai Preferensi Kebijakan ke dalam Kebijakan Ekonomi Internasional. Bank Indonesia selaku bank sentral mengeluarkan QRIS sebagai salah satu upaya untuk mencapai ASEAN Payment Connectivity Initiatives sebagai upaya berkontribusi pada peningkatan dalam sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi keuangan digital nasional. Selaras dengan hal ini, Bank Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara anggota ASEAN lainnya sejak tahun 2022. Namun, Indonesia telah melakukan uji coba dengan Thailand dalam pengimplementasian QR Code sejak tahun 2021 (Kementerian Sekretariat Negara RI 2022). Pada forum G20, implementasi *cross-border payment* dicanangkan akan menggunakan jaringan SWIFT untuk mencapai pembayaran yang cepat antarnegara dengan penerapan ISO 20022 pada High-Value Payment Systems. Adopsi ISO 20022 telah diberlakukan sejak Maret 2023 hingga November 2025 (Swift 2024).

Selain untuk mencapai ASEAN Payment Connectivity Initiatives, pengimplementasian *cross-border payment* juga direncanakan pada skala global yang didiskusikan melalui G20, yaitu Advancing Regional Digital Payment Connectivity di Bali, 14 November 2022. Pada lingkup regional, Indonesia telah bekerja sama dengan Malaysia, Singapura, Thailand,

dan Filipina melalui bank sentral masing-masing. Mekanisme *cross-border payment* di ASEAN dianggap sebagai salah satu komitmen dalam menuju transformasi digital (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2022). Selain itu, penandatanganan MoU di antara kelima negara tersebut akan mengimplementasikan beberapa hal yang mencakup QR Code melalui QRIS, pembayaran yang cepat, dan *Real Time gross Settlement* (RTGS) yang dibahas pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Negara ASEAN lainnya direncanakan akan menandatangani MoU yang sama setelah pembangunan dan penguatan terhadap sistem pembayaran domestik mereka dianggap telah mumpuni dalam mengimplementasikan hal ini (Kementerian Komunikasi dan Informatika 2023).

Penerapan QR Code secara khusus antara Indonesia dan Thailand dapat dilihat dari nilai pembayaran digital bruto di enam negara terbesar di ASEAN mencapai US\$806 miliar pada tahun 2022, naik 14% YoY dan diperkirakan akan meningkat mendekati US\$1,2 triliun pada tahun 2024. Ketersediaan *smartphone* dan meningkatnya penggunaan internet memainkan salah satu peran penting dalam meluasnya adopsi layanan perbankan *online*, *mobile money*, dan *e-wallet*. Pada tahun 2022, kepemilikan rekening di bank atau mendaftar pada penyedia *mobile money* meningkat dari 12% menjadi 62% sejak tahun 2011. Di sisi yang lain, penggunaan *e-wallet* di ASEAN merupakan salah satu yang terbesar di dunia dalam hal penetrasi *e-wallet*, yaitu Thailand (92%), Vietnam (91%), Filipina (88%), Malaysia (86%), dan Indonesia (82%) (World Economic Forum 2023).

Pengimplementasian QRIS dan Promptpay antara Indonesia dan Thailand ditujukan agar membentuk ekosistem pembayaran yang efektif antarpelaku pasar, terutama pada sektor pariwisata dan UMKM, sehingga tidak hanya terbatas pada pelaku pasar yang besar, seperti *business to business entities*. Namun, hal ini juga tidak menghalangi penerapan penyelesaian perdagangan lintas batas, investasi, dan pengiriman uang, serta kegiatan transaksi ekonomi lainnya yang menciptakan inklusivitas transaksi di kawasan Indonesia dan Thailand melakukan kerja sama dalam *cross-border payment* untuk memudahkan transaksi yang dilakukan antarpelaku pasar, terutama pada sektor pariwisata dan UMKM (Chandran 2023). Adanya QRIS dan Promptpay juga diupayakan untuk menumbuhkan sikap kompetitif dalam pasar global yang dapat dilihat dari upaya Indonesia di G20 mengenai *cross border payment* (World Economic Forum 2023). Dalam pengimplementasian QRIS dan Promptpay, biaya dan nilai tukar ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Thailand melalui bank sentralnya. Lalu, bank sentral akan memberikan keleluasaan bagi ACCD dalam membebaskan biaya-biaya tersebut dalam proses konversi nilai tukar antara rupiah dan baht (Chandran 2023).

Meskipun upaya yang dilakukan saat ini masih secara bilateral, tetapi Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia berencana bekerja sama dengan Bank for International Settlements dan Project Nexus untuk memperluas cakupan pengimplementasian *cross-border payment*, baik secara regional maupun global. Sistem pembayaran ini akan melakukan standarisasi untuk menghubungkan sistem pembayaran lainnya yang akan terkoneksi dengan Nexus. Jaringan ini akan melindungi SWIFT dengan autentikasi dua faktor (2FA) untuk mencegah adanya *fraud* atau serangan *hack* ketika salah satu pihak akan melakukan transaksi ke bank tujuan (Nexus, n.d.). Di sisi yang lain, penggunaan Nexus ini memungkinkan menjangkau seluruh sistem secara global dan menghindari pembuatan atau penggunaan *link* bilateral khusus (World Economic Forum 2023) (BIS 2024).

Meskipun secara MoU penerapan ini terlihat menjanjikan, tetapi masih terdapat beberapa tantangan yang harus diakui oleh Bank Indonesia maupun Bank of Thailand, yaitu salah satunya kesadaran dan pengetahuan dari para pelaku pasar, terutama pada sektor UMKM, untuk menggunakan QR Code dalam bertransaksi. Mekanisme penggunaan QR Code masih banyak belum diketahui oleh para pelaku pasar dan dari sisi Indonesia, terdapat beberapa biaya yang dibebankan pada *merchant* sebesar 0,3% untuk usaha mikro dan 0,7% untuk transaksi lainnya yang dikenal dengan *merchant discount rate* (MDR) (CNBC Indonesia 2023). Selain itu, tantangan lain untuk mencapai *regional payment* juga ditemukan karena adanya perbedaan sistem pembayaran domestik yang menerapkan standar teknis, format pesan, dan alur proses yang berbeda. Meskipun telah terdapat pengimplementasian ISO 20022, tetapi sistem tersebut seringkali disesuaikan dengan cara yang tidak kompatibel dan faktor teknis ini menambah kompleksitas hubungan yang akan dibentuk oleh negara dalam menerapkan *cross-border payment* (World Economic Forum 2023). Oleh karena itu, hal ini memerlukan aksi kolektif dari pemangku kepentingan dan para pelaku pasar untuk menerapkan ekosistem pembayaran dengan menggunakan QR Code.

Kesimpulan

Kebijakan luar negeri ekonomi Indonesia terhadap Thailand dalam *cross-border payment* dengan penggunaan QR Code diimplementasikan dengan mempertimbangkan nilai tukar dalam konversi nilai tukar antara rupiah dan baht dengan penunjukkan ACCD di masing-masing negara oleh bank sentral dan penerapan *floating exchange rate* yang dikembalikan ke masing-masing bank atau non-bank dalam menerapkan biaya yang diperlukan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan dengan dolar AS dan berusaha mencapai ASEAN Payment Connectivity Initiatives dan Advancing Regional Digital Payment. Meskipun secara implementasinya masih terus dikembangkan untuk menghasilkan tren yang lebih positif dalam penggunaan QR Code, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti perbedaan sistem pembayaran domestik, serta kesadaran dan pengetahuan dari para pelaku pasar dalam menggunakan mode pembayaran QR Code.

Tulisan ini hanya membahas mengenai nilai tukar sebagai salah satu preferensi kebijakan luar negeri ekonomi yang memaparkan bagaimana Indonesia mengatur dan bernegosiasi dengan Thailand dalam konversi nilai tukar antara rupiah dan baht sebagai bentuk dari pengurangan ketergantungan dengan dolar sehingga diperlukan penelitian selanjutnya yang membahas preferensi lainnya yang dapat menjelaskan lebih rinci mengenai penerapan QR Code dalam *cross-border payment*, seperti perdagangan, imigrasi, dan investasi asing dengan memaparkan data-data penunjang. Tulisan di masa depan mungkin akan lebih berfokus pada bagaimana pengimplementasian QR Code dapat memberikan dampak terhadap perdagangan masing-masing negara serta investasi asing yang masuk ke Indonesia dan/atau Thailand sebagai salah satu bentuk dari *local currency settlement*.

Daftar Pustaka

Buku atau Artikel dalam Buku

Hiscox, M. J. (2014). *The Study of Global Political Economy*. United Kingdom: Oxford University Press.

Artikel Jurnal

Azka, M. N. (2023). Dinamika Perkembangan Sistem Transaksi Pembayaran QRIS dan Ekspansi QRIS ke Berbagai Negara di Dunia. 1-13.

Nofansya, A., & Sidik, H. (2022). Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework dalam Memfasilitasi Perdagangan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 164-178.

Rifky, S. N., Nugrahaningsih, N., & Suratiningsih, D. (2023). Indonesian Diplomacy to Support Digital Transformation through the 2022 G20 Summit. *Jurnal Scientia*, 12(4), 804-814.

Rilo, A. D. (2018). ASEAN Financial Integration: Opprotunities, Risks, and Challenges. *Public Policy Review*, 14(5), 901-924.

Sari, Y. P., Akbar, U. U., Yeni, I., Putra, H. S., & Puspa Artha, D. R. (2023). Analysis of Exchange Rate and Inflation in Indonesia Under Floating Exchange Rate System. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 6(3), 361-368.

Sato, K. (2019). Prospects for Local Currency Involve Trade in ASEAN . S. *Rajaratnam School of International Studies* , 81-89.

Supadi, H. (2021). Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Perdagangan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. *JOM FISIP*, 8(2), 1-9.

Syifa, S. R. (2024). Menuju Integrasi Ekonomi ASEAN: Implementasi Local Currency Settlement Antara Indonesia, Malaysia, Dan Thailand. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 808-816.

Publikasi Daring

ASPI. (n.d.). *Sekilas ASPI*. Retrieved from [aspi-indonesia.or.id](https://www.aspi-indonesia.or.id/): <https://www.aspi-indonesia.or.id/tentang-kami/sekilas-aspi/>

BCA. (n.d.). *Local Currency Settlement*. Retrieved from [bca.co.id](https://www.bca.co.id/): <https://www.bca.co.id/id/Individu/layanan/pengiriman-uang/Remittance/Outward-Remittance/Local-Currency--Settlement>

- Bank Indonesia. (2021, Agustus 17). *Indonesia and Thailand Launch Cross-Border QR Payment Linkage*. Retrieved from bi.go.id: https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_170821.aspx
- Bank Indonesia. (2022, Juli 14). *Pembayaran Lintas Negara yang Cepat, Murah, dan Inklusif untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi*. Retrieved from bi.go.id: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2418322.aspx.
- Bank Indonesia. (2024, Februari 18). *QRIS Antarnegara*. Retrieved from <https://www.instagram.com/reel/C3ZLJgbMunB/?igsh=M3lyc29iNzJ5c3Bl>.
- Bank Indonesia. (2024, Juli 20). *Jejak QRIS Antarnegara diperluas hingga Korea Selatan*. Retrieved from <https://www.instagram.com/reel/C9oQtzHuZys/?igsh=MWVpMGlzYnhldGFhOA%3D%3D>.
- Bank Indonesia. (n.d.). *Local Currency Settlement (LCS) & Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)*. Retrieved from bicara131.bi.go.id: <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01093/en-us>.
- Bank Mandiri. (n.d.). *Kirim Uang ke Luar Negeri Makin Mudah dengan Mandiri Local Currency (LCS)*. Retrieved from bankmandiri.co.id: <https://www.bankmandiri.co.id/mandiri-local-currency>.
- Bank Negara Malaysia. (n.d.). *Differences between MYR-THB LCSF with Thailand and MYR-IDR LCSF with Indonesia*. Retrieved from bnm.gov.my: https://www.bnm.gov.my/documents/20124/761679/Infosheet_LCSF.pdf.
- Bank of Thailand. (2022, Agustus 29). *Joint Press Release Indonesia and Thailand Launch The Implementation of Cross-border QR Payment Linkage*. Retrieved from bot.or.th: <https://www.bot.or.th/en/news-and-media/news/news-20220829-1.html>
- Bank of Thailand. (2023, Agustus 25). *Joint Press Release: Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, and the Bank of Thailand Strengthen Cooperation to Promote the Use of Local Currencies in Bilateral Transactions*. Retrieved from bot.or.th: <https://www.bot.or.th/en/news-and-media/news/news-20230825-01.html#:~:text=Summary-,Bank%20Indonesia%2C%20Bank%20Negara%20Malaysia%2C%20and%20the%20Bank%20of%20Thailand,Local%20Currencies%20between%20the%20countries>.

- Bank of Thailand. (n.d.). *Cross-border Payment Linkages*. Retrieved from bot.or.th: <https://www.bot.or.th/en/financial-innovation/digital-finance/digital-payment/cross-border-payment.html#connectivites-item-8b71foba16>.
- BIS. (2024, Juli 1). *Project Nexus: enabling instant cross-border payments*. Retrieved from bis.org: <https://www.bis.org/about/bisih/topics/fmis/nexus.htm>.
- Chandran, N. (2023, Juli 30). *Southeast Asia moves closer to economic unity with new regional payments system*. Retrieved from cnbc.com: <https://www.cnbc.com/2023/07/30/asean-moves-closer-to-economic-unity-with-new-regional-payments-system.html>.
- CNBC Indonesia. (2023, Juli 5). *Hati-hati Transaksi QRIS! Jangan Mau Kena Biaya Tambahan*. Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230705113410-17-451487/hati-hati-transaksi-qr-is-jangan-mau-kena-biaya-tambahan>.
- Fintech Indonesia. (2021, Agustus 17). *BI Luncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran dan Uji Coba Interkoneksi QRIS & Thai QR Payment*. Retrieved from fintech.id: <https://fintech.id/id/news/detail/bi-luncurkan-standar-nasional-open-api-pembayaran-dan-uji-coba-interkoneksi-qr-is-&-thai-qr-payment>
- Greene, R. (2022, Agustus 22). *Southeast Asia's Growing Interest in Non-dollar Financial Channels—and the Renminbi's Potential Role*. Retrieved from carnegieendowment.org: <https://carnegieendowment.org/research/2022/08/southeast-asias-growing-interest-in-non-dollar-financial-channelsand-the-renminbis-potential-role?lang=en>.
- IDN Financial. (2022, Agustus 30). *Indonesia and Thailand to list QR Code as payment options*. Retrieved from idnfinancials.com: <https://www.idnfinancials.com/archive/news/44130/Indonesia-and-Thailand-to-list-QR-Code-as-payment-options>.
- ITMX. (n.d.). *Company History*. Retrieved from itmx.co.th: <https://www.itmx.co.th/about-us/company-history>.
- Jin, E. (2022, April 5). *Why China's CIPS Matters (and Not for the Reasons You Think)*. Retrieved from lawfaremedia.org: <https://www.lawfaremedia.org/article/why-chinas-cips-matters-and-not-reasons-you-think>.
- Kominfo. (n.d.). *Sistem Pembayaran Nasional: Switching Company Bakal Diintegrasikan*. Retrieved from kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/6721/sistem-pembayaran-nasional-switching-company-bakal-diintegrasikan/o/sorotan_media

- Medina, A. F. (2022, October 31). *Indonesia and Thailand Implement QR Payment Linkage, Key to Increasing Digital Integration in Southeast Asia*. Retrieved from aseanbriefing.com: <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-and-thailand-implement-qr-payment-linkage/>.
- Nexus. (n.d.). “*This is why we chose Nexus to protect the SWIFT platform*”. Retrieved from nexusgroup.com: <https://www.nexusgroup.com/this-is-why-we-chose-nexus-to-protect-the-swift-platform/>.
- Schonken, N. (2023, Februari 1). *SWIFT vs. Local Payment Routes*. Retrieved from blog.currencycloud.com: <https://blog.currencycloud.com/swift-vs-local-payment-routes>.
- Shofa, J. N. (2023, Juni 27). *Local Currency Settlements Hit \$2.1b in Jan-April: Bank Indonesia*. Retrieved from jakartaglobe.id: <https://jakartaglobe.id/business/local-currency-settlements-hit-21b-in-janapril-bank-indonesia>.
- Statista. (n.d.). *Gross domestic product (GDP) of the ASEAN countries from 2018 to 2028*. Retrieved from statista.com: <https://www.statista.com/statistics/796245/gdp-of-the-asean-countries/>.
- Statista. (n.d.). *Total value of the tourism’s contribution to the Gross Domestic Product in Thailand from 2017 to 2021*. Retrieved from statista.com: <https://www.statista.com/statistics/1143427/thailand-value-of-tourism-gdp/#:~:text=Value%20of%20tourism%20GDP%20Thailand%202017%2D2021&text=In%202021%2C%20the%20tourism%20industry,compared%20to%20the%20previous%20year.&text=Thailand%20is%20one%20of%20the%>.
- Statista. (2024, September 26). *Most used currency in the world for international payments in SWIFT from January 2019 to August 2024, based on share in total transaction value*. Retrieved from statista.com: <https://remote-lib.ui.ac.id:6499/statistics/1189498/share-of-global-payments-by-currency/>.
- Sutrisno, G. B. (2022, Agustus 29). *Indonesia rolls out international QR payments link-up with Thailand*. Retrieved from techinasia.com: <https://www.techinasia.com/indonesian-government-launches-international-qr-payments-thailand>.

- Medina, A. F. (2022, October 31). *Indonesia and Thailand Implement QR Payment Linkage, Key to Increasing Digital Integration in Southeast Asia*. Retrieved from aseanbriefing.com: <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-and-thailand-implement-qr-payment-linkage/>.
- Swift. (2024, Maret 18). *Beyond borders: Progressing towards the G20 targets for enhancing cross-border payments*. Retrieved from swift.com: <https://www.swift.com/news-events/news/beyond-borders-progressing-towards-g20-targets-enhancing-cross-border-payments>.
- Swift. (2024, Juni 24). *Future-proofing the financial ecosystem*. Retrieved from swift.com: <https://www.swift.com/news-events/news/future-proofing-financial-ecosystem>.
- The Jakarta Post. (2018, November 26). *Bank Indonesia to issue cross-border QR code payment regulation*. Retrieved from thejakartapost.com: <https://www.thejakartapost.com/news/2018/11/26/bank-indonesia-to-issue-cross-border-qr-code-payment-regulation.html>.
- World Economic Forum. (2023, November 17). *How ASEAN is making instant cross-border payments a reality*. Retrieved from weforum.org: <https://www.weforum.org/agenda/2023/11/asean-instant-cross-border-payments-paynow-promptpay/>